

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU

Diajukan untuk melengkapi serta memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

RADJA RIANA AGISTA
10675005082

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU

OLEH : RADJA RIANA AGISTA

Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pengelolaan pembangunan dan meningkatkan penerimaan daerah. Salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah yaitu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah pajak hotel. Semua sumber pendapatan dari penerimaan pajak hotel masuk ke dalam kas daerah, termasuk penerimaan lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah kota Pekanbaru. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan administrasi sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru. Keterbatasan kemampuan peneliti dan ketersediaan data sekunder yang diperoleh, maka peneliti melakukan wawancara kepada narasumber pelaksana sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru yang merupakan data primer. Untuk menganalisa penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh (data sekunder) dan data primer berupa hasil wawancara. Setelah dilakukan analisa hasil penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru dapat dikatakan bahwa sumber dari pendapatan ini cukup besar. Tetapi bila dilihat dari target terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh sistem penerimaan pajak hotel di Pekanbaru belum berjalan optimal. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Pelaksanaan penetapan pajak hotel juga sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, namun pada pelaksanaannya mengalami hambatan dimana sebahagian wajib pajak hotel yang mengisi SPTPD sering melakukan kesalahan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Dipenda Kota Pekanbaru tentang perubahan tarif kamar hotel maupun yang berkaitan dengan sistem self assesment. Kegiatan pembukuan dan pelaporan baik dari pihak Dipenda Kota Pekanbaru maupun dari wajib pajak hotel sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Pada tahap akhir pelaksanaan pemungutan dan penagihan kendala yang dihadapi adalah besarnya jumlah tunggakan pajak hotel oleh wajib pajak hotel di kota Pekanbaru Adapun upaya oleh Dipenda Kota Pekanbaru untuk mengatasi masalah ini adalah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang pajak hotel di Kota Pekanbaru dan memberikan sanksi yang sesuai. Berdasarkan analisis di atas diharapkan ada perbaikan pada sistem isian SPTPD untuk meminimalisir kesalahan dalam penetapan pajak, serta penegakan hukum (law inforcement) yang sesuai dengan Perda Nomor 05 Tahun 2006.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Realisasi penerimaan pajak hotel, sistem penerimaan pajak hotel.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Keuangan Daerah.....	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.3 Pengertian Pajak	15
2.4 Tinjauan Pajak Dalam Islam	17
2.5 Pajak Daerah	18
2.6 Pajak Hotel.....	19
2.6.1 Objek Pajak Hotel	22
2.6.2 Subjek Pajak Hotel	24
2.7 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel.....	24
2.8 Sistem Pemungutan Pajak Hotel	25
2.9 Sistem Penerimaan Pajak Hotel.....	27
2.10 Definisi Konsep	27
2.11 Konsep Operasional	28
2.12 Hipotesis	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.2 Jenis dan Sumber Data	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4 Teknik Analisis Data	32

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	34
4.1.1. Visi Kota Pekanbaru	36
4.1.2. Keadaan Geografis	38
4.2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	39
4.2.1. Visi	41
4.2.2. Misi	42
4.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	43
4.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Unit Kerja	46
4.5. Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Sistem Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru	55
5.1.1. Pendaftaran dan Pendataan	57
5.1.2. Penetapan Pajak	61
5.1.3. Pembukuan dan Pelaporan	64
5.1.4. Pemungutan dan Penagihan	68

5.2 Hambatan-Hambatan Dalam Sistem	
Penerimaan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru	77
5.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh	
Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	
Untuk Meningkatkan Penerimaan dari Sektor	
Pajak Hotel di Kota Pekanbaru	80

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pemerintah daerah diuntut untuk lebih berupaya semaksimal mungkin untuk menggali potensi dan kemampuan di setiap daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pengelolaan pembangunan, pengelolaan sumber daya dan meningkatkan penerimaan daerah. Hal tersebut demi kepentingan masyarakatnya, membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya dan melaksanakan pembangunan di daerahnya. Untuk mendapatkan hal tersebut maka masing-masing pemerintah daerah dituntut untuk bisa memenuhi semua kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakatnya dengan cara mencari sumber penerimaan daerahnya masing-masing yang mampu memenuhi segala pembiayaan dan pengeluaran daerahnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat di butuhkan sumber daya manusia yang professional dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Selain harus memiliki sumber daya manusia yang handal dan professional juga di perlukan pendanaan, pendanaan itu sangat penting sekali sifatnya karena tanpa adanya dana yang cukup maka pembangunan yang akan direncanakan sulit untuk direalisasikan. Untuk membiayai pembangunan daerah maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), baik

dengan meningkatkan penerimaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru sesuai dengan ketentuan yang sudah ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang penting untuk membiayai

seluruh pembiayaan daerah, pembangunan daerah dan membantu kelancaran roda pemerintahan.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dari Provinsi Riau, guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Pekanbaru berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah belum di gunakan kota Pekanbaru, untuk kota Pekanbaru sendiri masih menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha.

Disini penulis melihat bahwa pajak hotel merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial jika dikelola dengan baik karena dengan seiring

berkembangnya pembangunan kota Pekanbaru menjadi kota yang berkembang dengan pesat telah banyak hotel-hotel serta wisma-wisma yang berdiri di kota Pekanbaru. Berikut di bawah ini disajikan daftar hotel wisma serta penginapan yang terdata pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Daftar Nama Hotel, Wisma Serta Penginapan yang ada di Kota Pekanbaru.

No.	Nama Hotel	Alamat
1.	Hotel Tasia Ratu	Jl. Hasyim Ashari No. 10
2.	Hotel Raudah	Jl. Tangkuban Perahu No. 4
3.	Hotel Asean Baru	Jl. Tuanku Tambusai
4.	Hotel Resty Menara	Jl. Sisimangaraja
5.	Hotel Nuansa/Permai	Jl. Tanjung Datuk No. 87
6.	Hotel Indrapura	Jl. Dr. Sutomo No. 86
7.	Mona Plaza Hotel	Jl. HR. Subrantas Panam
8.	Hotel Sri Indrayani	Jl. Karet
9.	Hotel Furaya	Jl. Jend. Sudirman
10.	Hotel Dyan Graha	Jl. Gatot Subroto No. 9
11.	Hotel Ratu Mayang Garden	Jl. Jend. Sudirman
12.	Hotel Ibis	Jl. Soekarno Hata
13.	Hotel Grand Zuri	Jl. Teuku Umar
14.	Hotel Grand Elite	Jl. Riau Komplek RBC
15.	Hotel Aston Pekanbaru City	Jl. Jend. Sudirman
16.	Hotel Mutiara Merdeka	Jl. D. I. Panjaitan
17.	Hotel Pangeran	Jl. Jend. Sudirman
18.	Hotel Grand Jatra	Jl. T. Zainal Abidin
19.	Hotel Aryaduta	Jl. Diponogoro No. 34
20.	Hotel Bunda	Jl Prof. M. Yamin
21.	Wisma Muara Takus	Jl Cempedak
22.	Hotel Dharma Utama	Jl Sisimangaraja No. 10
23.	Hotel Widya	Jl. M. Ali
24.	Wisma Yani	Jl. Pepaya No.7
25.	Losmen Pekanbaru	Jl. Ir. H. Juanda
26.	Hotel Linda I	Jl. Tuanku Tambusai
27.	Wisma Unedo	Jl. Cempedak
28.	Hotel Afri	Jl. DR. Setia Budi
29.	Hotel Sinda	Jl. Pepaya No. 73
30.	Hotel Tampan	Jl. Riau
31.	Hotel Asean	Jl. Jend. Sudirman No. 722
32.	Hotel Angkasa	Jl. DR. Setia Budhi No. 89

33.	Hotel Anom	Jl. Gatot Subroto
34.	Wisma Tun Teja I	Jl. Kampar No. 34
35.	Wisma Tun Teja II	Jl. Sisingmangaraja No. 4
36.	Hotel Badduramsi	Jl. Sisingmangaraja No. 7
37.	Hotel Badar Lugina	Jl. Sisingmangaraja
38.	Wisma Bintan	Jl. Tangkuban Perahu
39.	Wisma Hang Tuah	Jl. Hang Tuah
40.	Wisma Hang Jebat	Jl. Hang Jebat No. 18 A
41.	Penginapan Satria	Jl. Cik Di Tiro No. 99
42.	Hotel Nanking	Jl. Raya Kulim
43.	Penginapan Rina	Jl. M. Yatim
44.	Hotel Riki Indah	Jl. Soekarno Hatta No. 206
45.	Wisma Cempaka	Jl. Campaka No. 98
46.	Hotel Gemini	Jl. Taskurun No. 44
47.	Hotel Pekanbaru City	Jl. Sam Ratulangi No. 28
48.	Hotel Linda II	Jl. Tuanku Tambusai No. 145
49.	Hotel Holie	Jl. Tuanku Tambusai No. 116 B
50.	Wisma Indah	Jl. DR. Samanhudi No. 901
51.	Hotel Bumi Asih	Jl. Jend. Sudirman No. 51
52.	Wisma Flora Home Stay	Jl. Kapling I / Jl.Samarinda No. 7
53.	Wisma Taskurun	Jl. Taskurun
54.	Wisma Bina Lestari	Jl. Prof. M. Yamin No. 19
55.	Hotel Senapelan	Jl. Prof. M. Yamin
56.	Wisma Firman	Jl. H. Imam Munandar
57.	Hotel Mini	Jl. Teuku Umar No. 21
58.	Hotel Lido	Jl. Tuanku Tambusai No. 124 A
59.	Hotel Afrida	Jl. Gambir
60.	Hotel Shorea	Jl. Taskurun
61.	Wisma Mela	Jl. Paus No. 4
62.	Wisma Sukajadi	Jl. Melur
63.	Hotel Makmur Jaya	Jl. Riau
64.	Hotel Mahkota	Jl. Ir. H. Juanda
65.	Wisma Tirta Kencana	Jl. Kaharuddin Nasution
66.	Penginapan Kaustar	Jl. Dr. Setia Budhi
67.	Wisma Dwi Darma	Jl. Utama/Nenas No. 90 A
68.	Hotel Damon	Jl. Hang Tuah No. 46 A
69.	Pondok Wisata Idayu	Jl. Lili No. 31
70.	Hotel Bidadari	Jl. Gatot Subroto No. 2
71.	Wisma Aroma	Jl. Ir. H. Juanda No. 48-50
72.	Wisma 45	Jl. H. Imam Munandar
73.	Wisma 81	Jl. Jend. Susdirman
74.	Hotel Bintang Mas	Jl. Dr. Sutomo No. 90
75.	Hotel Intan	Jl. Tuanku Tambusai Kav. 5-6
76.	Wisma Surya	Jl. Cempedak

77.	Wisma Pelangi	Jl. Gatot Subroto No. 39 C-D
78.	Emma Graha Hotel	Jl. Soekarno Hatta
79.	Hotel Aloha	Jl. Tanjung Datuk
80.	Hotel Holiday	Jl. Tanjung Datuk
81.	Hotel Jaya Mulia	Jl. Riau NO. 168
82.	WISMA 63	Jl. Riau Ujung
83.	Hotel Delta	Jl. Sisingamangaraja
84.	Wisma Sumber Mas Raya	Jl. Tanjung Datuk No. 241
85.	Hotel Siak Resort	Jl. Meranti Ujung
86.	Wisma Dahlia	Jl. Dahlia No. 137
87.	Hotel Sogho	Jl. Soekarno Hatta
88.	Surya Vitra Hotel	Jl. Siak II
89.	Wisma Melati	Jl. Kota Baru No. 43
90.	Wisma Permata	Jl. Jend. Sudirman
91.	Hotel Sepupu Satria	Jl. Arifin Achmad No. 88
92.	Wisma Amanda	Jl. Gulama No. 9-10 C
93.	Wisma SMR	Jl. H. R. Subrantas
94.	Wisma Benny	Jl. Paus Rumbai
95.	Hotel Oase	Jl. Wahid Hasyim No. 255
96.	Hotel Radja	Jl. Hasanuddin
97.	Sabrina Traveller Budget Hotel	Jl. T.Tambusai Komplek Paninsula
98.	Hotel Akasia	Jl. Jend. Sudirman
99.	Sabrina City Hotel	Jl. Tuanku Tambusai

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2009.

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang pajak hotel, hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah kota Pekanbaru melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan pendapatan daerah kota Pekanbaru termasuk di dalamnya pajak hotel.

Pajak Hotel adalah iuran atau pungutan pajak atas pelayanan hotel. Realisasi penerimaan pajak hotel adalah semua hasil penerimaan secara keseluruhan yang sudah ditetapkan sebelumnya, lebih jelasnya dapat di lihat tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2006 Sampai Tahun 2009 Di Kota Pekanbaru

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)
2006	7.382.404.864,00	7.399.752.966,00	100,23
2007	10.654.867.700,00	8.325.740.668,00	78,14
2008	10.921.239.000,00	8.028.164.539,00	73,51
2009	13.220.955.080,00	9.020.174.352,00	68,23

(Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2009)

Dari tabel 1.2. diatas menunjukkan bahwa tahun 2006 target yang ditetapkan pajak hotel sebesar Rp. 7.382.404.864 penerimaan dari sektor pajak hotel yang terealisasi yang tercapai adalah sebesar Rp. 7.399.752.966 atau sebesar 100, 23%, pencapaian yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dan pada tahun 2007 target yang telah ditetapkan pajak hotel adalah Rp. 10.654.867.700 dan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 8.325.740.668 atau 78,14%. Kemudian pada tahun 2008 target yang telah ditetapkan untuk pajak hotel sebesar Rp. 10.921.239.000 dan realisasi penerimaan pajak hotel yang diterima dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 8.028.164.539 atau sebesar 73,51% mengalami penurunan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 target yang telah di tetapkan yaitu sebesar Rp. 13.220.955.080 dan realisasinya penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 9.020.174.352 atau sebesar 68,23%. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak hotel tidak dapat terealisasikan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana dan penanggungjawab dalam bidang pengelola keuangan daerah kota Pekanbaru. Salah satunya adalah mengelola penerimaan pajak hotel, dimana melalui pelaksanaan sistem penerimaan yang harus dilalui tahap demi tahap, sistem

tersebut saling berhubungan dan kait mengait satu sama lainnya. Penurunan realisasi penerimaan pajak hotel dan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan yang terjadi di kota Pekanbaru disinyalir merupakan dari pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota yang belum berjalan optimal, sehingga unit terkait dalam kegiatan penerimaan pajak hotel belum mampu mencapai penerimaan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Pemerintah daerah kota Pekanbaru diharapkan dapat memaksimalkan potensi di daerahnya. Hal tersebut berdampak pada meningkatkan pendapatan asli daerah. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub sistem yang ada di dalamnya. Menurut Drs.Ig.Susanto (2005:2) organisasi merupakan proses kerjasama untuk mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan secara bersama.

Dari pengertian organisasi di atas menyiratkan bahwa proses organisasi adalah langkah-langkah yang harus dilalui dalam usaha mencapai tujuan bersama, proses organisasi itu berjalan harus berdasarkan sistem prosedur yang sistematis serta tata kerja yang harus di analisis sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan mengambil judul :“ **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di rumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut : “ **Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Penerimaan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru ?**”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dari hasil penelitian ini maka instansi terkait bisa lebih berusaha menerapkan peraturan daerah dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel.
2. Menambah wawasan peneliti mengenai perpajakan daerah, yang selama ini pengetahuan peneliti masih minim mengenai pajak daerah.
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya di kemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan tentang: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi Lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi keadaan umum kantor Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Pekanbaru, struktur organisasi, uraian tugas, keadaan pegawai, serta fasilitas kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil pengolahan data lapangan, hasil penelitian di lapangan serta distribusi wawancara tentang sistem penerimaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, hambatan dalam sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru dan Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan sarana yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Prof. Drs. HAW Widjaja, 2004 : 147).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H, 2006:786).

Bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah dan tingkat keuntungannya. Setiap pemerintah daerah harus mampu menggali potensi untuk dapat membiayai seluruh biaya hidup daerahnya masing-masing.

Dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
 2. Dana perimbangan.
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Sumber penerimaan daerah yang kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari :
1. sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
 2. penerimaan pinjaman daerah.
 3. dana cadangan daerah
 4. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (Prof. Drs. C.S.T.Kansil, S.H, 2006:787).

Dari penjelasan di atas dapat dipastikan bahwa setiap pemerintah daerah harus mampu membiayai kehidupan daerahnya dengan cara harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi daerah.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ahmad Yani SH, MM.Ak, 2008:51).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah itu sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Beberapa jenis pajak itu diserahkan masing-masing baik kepada daerah provinsi

maupun daerah kabupaten/kota. Adapun kepada daerah provinsi, yang menjadi kewenangannya dalam pengutipan pajak daerah ini meliputi:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Sedangkan bagi daerah kabupaten/kota sumber pendapatan daerahnya dari sektor pajak daerah ini meliputi:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan
7. Pajak parkir.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang menjadi tulang punggung otonomi daerah bahkan dapat dikatakan lebih lanjut bahwa sektor pendapatan asli daerah inilah yang menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah daerah-daerah akan mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.(Dr. Faisal Akbar Nasution,S.H,M.Hum, 2009:123).

2.3. Pengertian Pajak

Menurut Rachmat Soemitro (2009;124) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Menurut Prof.Dr.PJA.Adriani (2001:23) pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan hal ini maka pembayaran pajak wajib dan sifatnya memaksa dan tidak dapat di hindari karna sudah tercantum dalam undang-undang dan pemerintah tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu pemerintah pusat atau kas pemerintahan daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pemabayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pemabayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib pembayarannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.4. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Pajak yang terutang dalam agama Islam tertulis dalam Al-Quran surat At-Taubah Ayat 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
وَأَوَّلَ الْآخِرِ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ لَا وَ, يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

Artinya:

”Perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (At-Taubah:29)

Jizyah disini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan diri mereka.

2.5. Pajak Daerah

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Marihot P. Siahaan, S.E , 2008 : 9).

Menurut Marihot P. Sihaan (2008: 10) Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenang pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak yang bersangkutan. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan sebelas jenis pajak daerah yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Untuk kota Pekanbaru sendiri undang-undang nomor 28 tahun 2009 belum berlaku, undang-undang tersebut masih baru jadi untuk kota Pekanbaru masih menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

2.6. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). (Hadi Setia Tunggal, SH, 2009:5).

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. (Marihot P. Siahaan, S.E, 2008:245).

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk peryokoan dan perkantoran. (Agus Setiawan, Ak, 2006:351).

Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. (Marihot P. Siahaan, S.E, 2008:246).

Adapun Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang pajak hotel pasal 1, yaitu:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

8. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru
10. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi Orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran
11. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas Penginapan atau Fasilitas tinggal jangka pendek, Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu, bukan untuk umum, Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan
12. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel
13. Wajib pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel

14. Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim
15. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pembayaran kepada Hotel
16. Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah, yang disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perUndang-undangan perpajakan daerah
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

2.6.1. Objek pajak hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjuang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Menurut Marihot P. Siahaan, S.E (2008:247) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 kota Pekanbaru dalam Pasal 2, tentang tidak termasuk objek pajak hotel yaitu:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel.
2. Pelayanan tinggal diasrama, dan Pondok Pesantren.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.6.2. Subjek pajak hotel dan Wajib pajak hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan pengertian wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak hotel yaitu konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Dan yang menjadi wajib pajak hotel yaitu pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Jadi subjek pajak hotel dan wajib pajak hotel itu tidak sama.

2.7. Dasar pengenaan pajak tarif pajak hotel

Menurut Marihot P. Siahaan, S.S (2008:249) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tarif pajak hotel yang ditetapkan adalah sebesar 10% dari nilai jual objek pajak (NJOP) dan ini ditetapkan dengan pertauran daerah atau kabupaten bersangkutan. Tariff pajak hotel ditetapkan dengan Pertauran Daerah. Nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,

dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Dalam peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 pasal 3 disebutkan:

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa tarif pajak hotel itu ditetapkan oleh masing-masing peraturan daerah dan paling tinggi adalah 10%. Hal ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tariff pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

2.8. Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi tahun 1983. penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalm Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu ;

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya. (Marihot P. Siahaan, SE, 2008; 71)

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota atau Kabupaten, yang ditunjuk oleh walikota atau bupati.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Pekanbaru dalam Bab II pasal 6 dikatakan bahwa tata cara pemungutan pajak hotel yaitu:

1. Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
2. Pajak dipungut berdasarkan ketetapan wajib pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

3. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (KPD) atau dokumen Lain yang dipersamakan.

2.9. Sistem Penerimaan Pajak Hotel

Adapun menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang pajak hotel dan prosedur yang harus ditempuh dalam penerimaan pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan pendataan
2. Penetapan Pajak
3. Pembukuan dan Pelaporan
4. Pemungutan atau penagihan. (*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2009*).

Sistem kerja tersebut adalah sebuah rangkaian yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang harus dilaksanakan dengan baik agar realisasi penerimaan dari pajak hotel dapat memenuhi dari target yang sudah ditetapkan.

2.10. Definisi Konsep

Definisi konsep berisi uraian singkat dari variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu:

1. Pendaftaran dan pendataan

Adalah kegiatan yang dimaksud untuk mengumpulkan data mengenai potensi objek pajak dan subjek pajak hotel-hotel yang ada di kota Pekanbaru.

2. Penetapan Pajak

Adalah kegiatan dimana pengusaha hotel yang telah mendaftarkan usahanya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotelnya.

3. Pembukuan dan Pelaporan

Adalah kegiatan dimana pencatatan data-data tentang pajak hotel di kota Pekanbaru sebagai pedoman untuk membuat realisasi penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru.

4. Pemungutan (Penagihan)

Adalah kegiatan penarikan iuran pajak hotel yang teridentifikasi di Kota Pekanbaru. (*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2009*).

2.11. Konsep Operasional

Konsep-konsep yang dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengertian dan untuk memudahkan penelitian dan instansi instansi yang digunakan, maka dirumuskan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada konsep teoritis. Dengan kata lain, definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Dalam menghindari salah penafsiran terhadap konsep maka perlu diuraikan definisi secara operasional terhadap beberapa istilah diantaranya :

1. Pajak adalah pungutan yang dilakukan daerah atas pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa dan pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai peraturan yang berlaku, berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2006.
2. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
3. Penerimaan merupakan kegiatan penerimaan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada setiap wajib pajak hotel yang sudah terdata.
4. Pendaftaran dan Pendataan merupakan kegiatan dimana wajib pajak hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada Walikota Kota Pekanbaru, didalam praktek umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dalam jangka waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk kukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

5. Penetapan Pajak yaitu merupakan kegiatan petugas penetapan hanya menghitung besarnya pajak yang akan dikenakan berdasarkan data. Rencana dalam pelaksanaan penetapan.
6. Pembukuan dan Pelaporan merupakan kegiatan pencatatan data-data tentang pajak wajib hotel yang ada di Kota Pekanbaru ke dalam buku jenis pajak yang ada serta membuat laporan hasil realisasi penerimaan sesuai dengan yang telah di setor oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah suatu instansi pemerintahan sekaligus unsur pelaksana daerah dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi kegiatan penerimaan pajak hotel tersebut.

2.12. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “ **Diduga tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru disebabkan oleh pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel yang di kelola oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru belum optimal**”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari-Mei 2010.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang di butuhkan dalam penulisan ini, terdiri atas :

1. Data Primer yaitu data yang penulis kumpulkan dari hasil wawancara/interview dengan narasumber atau responden dan data lainnya yang di peroleh dari objek penelitian mencakup:
 - a. Sistem Penerimaan Pajak Hotel yakni :
 1. Pendataan dan Pendaftaran
 2. Penetapan Tarif
 3. Pembukuan dan pelaporan
 4. Pemungutan atau penagihan
 - b. Hambatan dalam pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru.
 - c. Upaya yang dilaksanakan Dipenda Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh penulis dari hasil studi perpustakaan berupa bahan-bahan bacaan, dan data yang sudah ada di instansi. Hal ini berarti data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan daerah Kota Pekanbaru dan instansi yang bisa mendukung, misalnya: jumlah pegawai, tingkat pendidikan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dan sejarah Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, data realisasi dan data-data lainnya. Kemudian bahan bacaan berupa berita yang dimuat dalam media cetak.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Observasi

Merupakan kegiatan pengamatan langsung kelapangan terhadap objek penelitian yang ada dalam angka untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai penerimaan pajak hotel.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis penerimaan pajak hotel pada kota pekanbaru ini melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Setelah data penelitian yang dibutuhkan terkumpul dan terklasifikasi menurut jenisnya maka selanjutnya dianalisa dengan

mengaitkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudian dihasilkan terhadap hasil yang akurat dan relevan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "**Pekan Baharu**" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu

sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut **PEKANBARU**.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota baru.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

4.1.1. Visi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah **"Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa"**.

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

1. Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.
2. Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan

prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.

3. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adapt yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.
4. Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.
5. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang

merugikan dengan memperkuat sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan **yang harmonis, seimbang dan selaras.**

4.1.2. Keadaan Geografis

Letak dan luas Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 -50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Batas kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Sungai kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas keseluruhan mencapai 632,26 km² (63.266 Ha).

4.2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dalam upaya mendukung Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dearah Rerpublik Indonesia Nomor 05 Tahun 2000, Dinas Pendapatan Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan.
2. Pelatihan bidang pendapatan.
3. Alokasi sumber daya manusia potensial.
4. Penelitian yang mencakup wilayah kota bidang pendapatan.
5. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
6. Penyelenggaran pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah.
9. Penyusunan rencana bidang pendapatan daerah.
10. Penyelenggaraan sistem bidang pendapatan daerah.
11. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan.
12. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah.
13. Penetapan dan pemungutan pajak/retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah. Dalam menjalankan atau menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis

Dinas Pendapatan Daerah mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan, kerjasama dengan instansi lain guna kelancaran tugas, membina segala usaha/kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pemungutan, pengawasan/pemantauan, pengembangan dan pengkajian pengendalian potensi penerimaan daerah, selain itu Dinas Pendapatan Daerah juga berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pengelolaan data/informasi,

perhitungan realisasi objek dan subjek pajak retribusi daerah maupun penerimaan daerah lainnya.

2. Pemberian Pelayanan Umum

Sebagai pemberi pelayanan umum dibidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah berperan dalam mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan teknis pemberian pelayanan umum, merumuskan dan melaksanakan penyiapan penagihan tunggakan pendapatan daerah, merumuskan melaksanakan pencatatan, perhitungan dan pemindahbukuan, merumuskan dan melaksanakan distribusi serta penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Wajib Pajak.

3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan

Dalam pengelolaan urusan ketatausahaan, Dinas Pendapatan Daerah berperan mengkoordinasikan, membina, merumuskan, melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan. Fungsi ini lebih menekankan kepada pengelolaan urusan intern dinas yang menyangkut kegiatan unit kerja dan pegawai yang bertugas di dinas ini.

4.2.1. Visi

Visi dari Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru yaitu “ Pendapatan dan Pelayanan” dari pernyataan visi tersebut terdapat beberapa point penting sebagai berikut:

Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan terwujud melalui Tertib Administrasi dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber Pajak dan Retribusi serta pendapatan lainnya yang berpotensi, sehingga diharapkan realisasi penerimaan daerah akan melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru setiap tahunnya.

Pelayanan

Pelayanan mengandung makna adanya transparan mengenai tarif dan prosedur penyelesaian urusan, baik tata cara pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah maupun perizinan serta didukung oleh peran serta masyarakat.

4.2.2. Missi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkanlah missi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Missi Pertama

Meningkatkan pendapatan daerah mengandung pengertian bahwa Pendapatan Daerah yang merupakan bagian dari APBD mencerminkan kegiatan Pemerintah Kota harus meningkatkan penerimaannya, tidak saja yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tetapi juga yang dilaksanakan oleh Dinas atau instansi pengelola penerimaan lainnya.

Missi Kedua

Mengkoordinir melaksanakan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pemungutan dengan memanfaatkan sumber potensi tersedia.

Missi ketiga

Menerapkan Sistem dan Prosedur Administrasi Pendapatan Daerah mengandung arti bahwa sistem dari prosedur yang merupakan koridor tertib administrasi Pendapatan Daerah, memberikan kepastian dan efektivitas pelayanan dibidang Pendapatan Daerah.

Missi Keempat

Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah mengandung makna dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem prosedur Pendapatan Daerah, diharapkan pengelolaan penerimaan dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, serta berkeadilan.

4. 3 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dan fungsinya di berikan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008. berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang harus di laksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1. Kedudukan.

- a. Dinas Pendapatan Daerah Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- e. Bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- g. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- h. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru saat ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya namunada beberapa perubahan yang ikut mempengaruhi Struktur Organisasi Tata Laksana (SOT) Dinas Pendapatan Kota

Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah.
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang pendapatan daerah.
- e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ditetapkan.
- g. Intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah.
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah.

- j. Melaksanakan pelatihan dan pembimbingan teknis dibidang pendapatan daerah.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan;
- b. Pengambilan keputusan;
- c. Perencanaan;
- d. Pengorganisasian;
- e. Pelayanan umum dan teknis;
- f. Pengendalian/ pengarahan/ pembinaan dan bimbingan;
- g. Pengawasan;
- h. Pemantauan dan evaluasi;
- i. Pelaksanaan lapangan;
- j. Pembiayaan;
- k. Penelitian dan pengkajian;
- l. Pelaporan

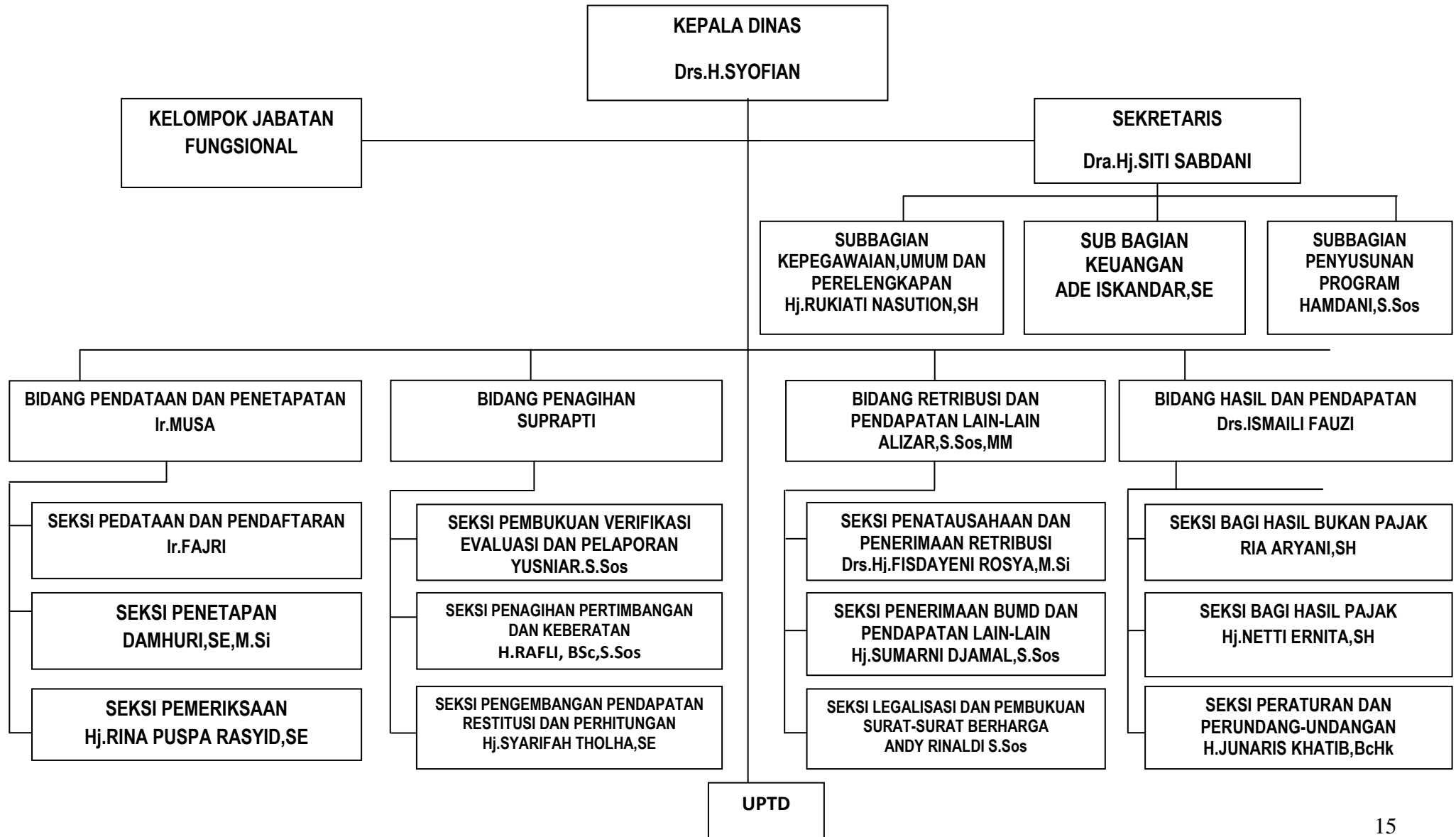
4. 4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Unit Kerja.

Dalam kegiatan suatu instansi diperlukan adanya suatu struktur dan jalur koordinasi antara anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan terlebih dahulu, struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif

dan efisien. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai alat organisasi yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan-hubungan tanggung jawab baik secara vertikal maupun secara horizontal, dengan kata lain wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepala Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

STRUKTUR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU



Dibentuknya struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini adalah untuk memberi batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap bagian unit kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat uraian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :

1. *Kepala Dinas*

2. *Sekretariat*

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program

3. *Bidang Pendataan dan Penetapan*

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- b. Seksi Penetapan
- c. Seksi Pemeriksaan.

4. *Bidang Penagihan*

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Seksi Penagihan, Pertimbangan, dan Keberatan;
- c. Seksi Pengembangan Pendapatan, Retribusi, dan Perhitungan.

5. *Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain*

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

- a. Seksi Retribusi;
- b. Seksi Pendapatan Lain-lain;
- c. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga.

6. *Bidang Bagi Hasil Pendapatan*

Bidang Bagi Hasil terdiri dari :

- a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
- c. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan.

1.5. Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Suatu kelogisan apabila kelancaran pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan tidak terlepas dari eksistendi para pegawai yang berperan sebagai penggerak organisasi itu sendiri bahkan menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap organisasi. Hal ini berarti bahwa, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki sejumlah personil tenaga kerja yang menjadi penggerak organisasi berhubungan dengan pencapaian penerimaan daerah bagi pemasukan keuangan daerah, yakni komponen pegawai yang teridentifikasi melalui tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jumlah pegawai.

1.5.1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan itu sangat penting bagi seorang pegawai dan juga bagi sebuah organisasi karena untuk pencapaian tujuan organisasi agar berjalan dengan baik. Dengan bekal pendidikan maka seorang pegawai dapat menjalankan tugas dengan baik.

Begitu halnya dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tingkat pendidikan sangat penting demi tercapainya tujuan organisasi. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan dan pangkat pegawai dapat di lihat dari data sebagai berikut :

Tabel 4.5.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana Strata 2	3	5,17
2	Sarjana Strata 1	30	51,72
3	Diploma III	3	5,17
4	SLTA	20	34,5
5	SLTP	2	3,44
	Jumlah	58	100,00

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai d Dinas Pendapatan Daaerah Kota Pekanbaru cukup baik, dimana terdapat 3 orang (5,17 %) yang tamat S2, dan 30 orang (51,72) yang tamat S1, kemudian 3 orang (5,17%) yang tamat D3, sedangkan tamatan SLTA sebanyak 20 orang (34,5%) serta terdapat 2 orang (3,44) sebagai tamatan SLTP. Disini sangat jelas bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru rata-rata adalah tamatan Sarjana S1.

1.5.2. Berdasarkan Pangkatan dan Golongan

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas terdiri dari sejumlah bagian kerja yang ada, dengan potensi pegawai yang berjumlah 58 orang, untuk lebih jelasnya jumlah pegawai berdasarkan golongan akan dilengkapi dengan tabel pegawai menurut golongan.

Tabel 4.5.2 Keadaan Pegawai menurut Pangkat dan Golongan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

No	Pangkat / Golongan	Jumlah	Persentase (%)
	Golongan II		
1.	A	2	3,45%
2.	B	1	1,72 %
3.	C	2	3,45 %
4.	D	7	12,07%
	Golongan III		
1.	A	18	31,03 %
2.	B	6	10,34%
3.	C	9	15,52%
4.	D	8	13,8%
	Golongan IV		
1.	A	3	5,17 %
2.	B	2	3,45 %
3.	C	-	-
4.	D	-	-
	Jumlah	58	100 %

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki pegawai dengan berbagai jenis golongan dimulai dari golongan II/a sampai golongan IV/b dengan perincian, golongan II/a berjumlah 2 orang atau sama dengan 3,45 persen dari 58 jumlah pegawai, golongan II/b berjumlah 1 orang atau 1,72 persen. Golongan II/c berjumlah 2 orang atau 3,45 persen, golongan II/d berjumlah 7 orang atau 12,07 persen. Golongan III/a berjumlah 18 orang atau 31,03 persen, golongan III/b berjumlah 6 orang atau 10,34 persen, golongan III/d berjumlah 8 orang atau 13,8 persen, golongan IV/a berjumlah 3 orang atau 5,17 persen, golongan IV/b berjumlah 2 orang pegawai atau sama dengan 3,45persen dari 58 orang jumlah pegawai. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini belum ada yang mencapai golongan IV/c dan IV/d.

1.5.3. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai dalam suatu organisasi tentunya akan mempengaruhi maksimalnya suatu pencapaian tujuan maupun visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat diketahui pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4.3 Jumlah Pegawai menurut Jenis kelamin pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	31	53,45 %
2.	Perempuan	27	46,55 %
	Jumlah	58	100 %

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,2010)

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berjumlah 58 orang dengan perincian laki-laki berjumlah 31 orang atau sama dengan 53,45 % dari 58 orang pegawai dan pegawai perempuan berjumlah 27orang atau sama dengan 46,55 %dari 58 orang pegawai. Hal ini membuktikan bahwa pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dari jumlah pegawai perempuan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

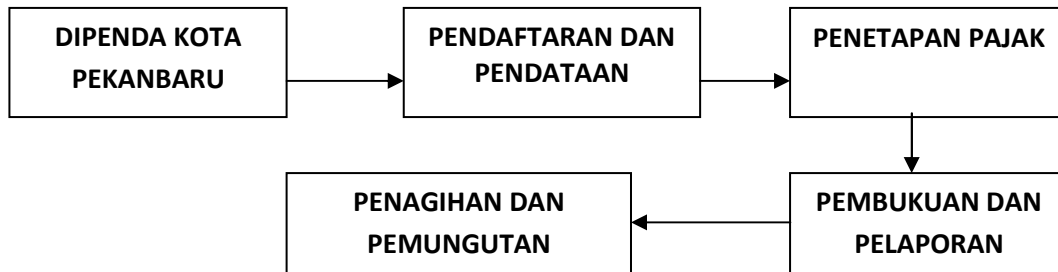
Didalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru, hambatan dalam sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru serta upaya yang dilakukan Dipenda Kta Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru yang di dapat melalui wawancara serta data sekunder sehingga akan diperoleh data yang akurat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru.

5.1. Sistem Penerimaan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru

Dalam mencapai tujuan dalam suatu kegiatan, maka sebuah organisasi memerlukan suatu sistem agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu pula yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan sistem penerimaan pajak hotel, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus berdasarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan pedoman bagi aparat/unit kerja terkait dengan pengelolaan pajak daerah. Sistem penerimaan pajak hotel adalah merupakan rangkaian sistem yang sistematis, dimana satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan.

Untuk melakukan kegiatan sistem penerimaan pajak hotel ini pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki sistem yang harus dilalui, yaitu :

Gambar 5.1. Sistem Penerimaan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.



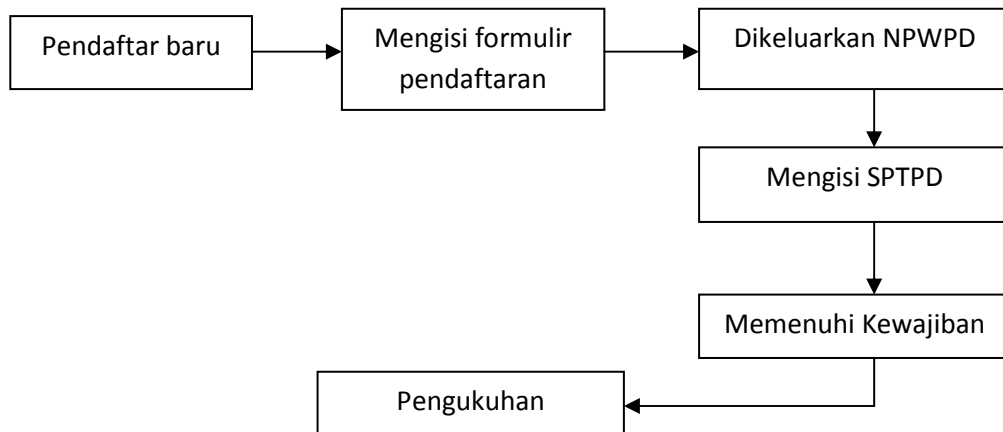
(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010)

Dari gambar di atas adanya sistem penerimaan pajak hotel ini mempunyai tahapan-tahapan atau rangkaian-rangkaian yang secara sistematis dan berurutan. Hal ini bertujuan untuk di dalam pelaksanaan penerimaan pajak hotel yang dikelola oleh Dipenda Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan optimal supaya target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik atau dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru tiap tahunnya. Diawali dengan Dipenda Kota Pekanbaru selaku unsur pelaksana dan penanggungjawab dalam bidang pengelola keuangan daerah kemudian tahapan berikutnya pada tahap pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak, pembukuan dan pelaporan kemudian tahap akhir adalah penagihan atau pemungutan untuk kemudian semua penerimaan pajak hotel masuk ke dalam kas daerah kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui penjelasan lebih rinci tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut yaitu :

5.1.1 Pendaftaran dan Pendataan

Gambar 5.1.1. Rangkaian Proses Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.



(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010)

Pendaftaran ini dilakukan untuk menjaring secara optimal wajib pajak yang mempunyai kewajiban terhadap pajak daerah. Dari gambar di atas wajib pajak hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru jangka waktu paling lambat yaitu 30 hari sebelum wajib pajak hotel melakukan kegiatan usahanya kemudian mengisi formulir pendaftaran wajib pajak yang disediakan oleh Dipenda Kota Pekanbaru untuk kemudian diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Petugas Dipenda Kota Pekanbaru lalu mencatat formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak yang telah diisi oleh wajib pajak. Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) setiap awal masa pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberitahuan pajak Daerah ini digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006.

Setelah wajib pajak hotel telah memenuhi kewajiban dan melengkapi persyaratan kemudian dikeluarkanlah Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Surat pengukuhan digunakan untuk memberikan kepastian terhadap Wajib Pajak Hotel yang dimasukkan dalam daftar isian formulir pendaftaran secara lengkap dan benar, sebagai penanggungjawab pajak daerah. Penggolongan Wajib Pajak didasarkan pada Surat Izin Tempat Usaha (SITU), yang merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sebagai pelaksana di lapangan adalah unit Bidang Pendataan dan Penetapan yaitu pada seksi Pendataan dan Pendaftaran.

Adapun data Hotel dan Wisma yang telah terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. Jumlah Objek Pajak Hotel yang Terdata Usahanya Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No.	Klasifikasi Hotel	Jumlah/Unit	Persen (%)
1.	Bintang 1	5	4,95%
2.	Bintang 2	2	1,98%
3.	Bintang 3	7	6,93%
4.	Bintang 4	3	2,97%
5.	Bintang 5	2	1,98%
6.	Wisma/Melati	82	81,19%
Jumlah		101	100%

(Sumber:Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, 2010)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penjaringan objek pajak hotel yang telah terdata pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dimana wajib pajak hotel mendaftarkan hotelnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pernyataan dan data tersebut disampaikan bahwa jumlah objek pajak

hotel yang sudah terdata sesuai dengan keadaan dilapangan yaitu sebanyak 101 unit hotel yang terdiri dari 5 unit hotel bintang 1, 2 unit hotel bintang 2, 7 unit hotel bintang 3, 3 unit hotel bintang 4, dan 2 unit hotel bintang 5, serta sisanya merupakan wisma atau hotel yang berkelas melati sebanyak 82 unit, ada 2 unit wisma yang tutup dan pada tahun 2010 ini ada 3 unit wisma yang baru.

Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di lapangan terhadap wajib pajak hotel sudah baik. Hal ini di buktikan dari data pada tabel 5.1.1 di atas, sudah banyak hotel yang telah terdata di Dipenda Kota Pekanbaru. Pernyataan Bagian Pendaftaran dan Pendataan pihak hotel sudah sadar akan kewajiban untuk mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kota Pekanbaru. Dan semua hotel yang sudah mendaftarkan usahanya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Hotel-hotel yang telah terdata pada Dipenda Kota Pekanbaru untuk kemudian melaporkan potensi hotel mereka masing-masing sebagai proses penetapan pajak yang akan di tetapkan nanti.

Namun demikian dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan di lapangan sering terjadi beberapa permasalahan hal tersebut merupakan hasil wawancara dengan bidang pendaftaran dan penetapan yaitu pada seksi Pendataan dan Pendaftaran dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini :

Tabel 5.1.1.2. Permasalahan dan Tindakan dalam Proses Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

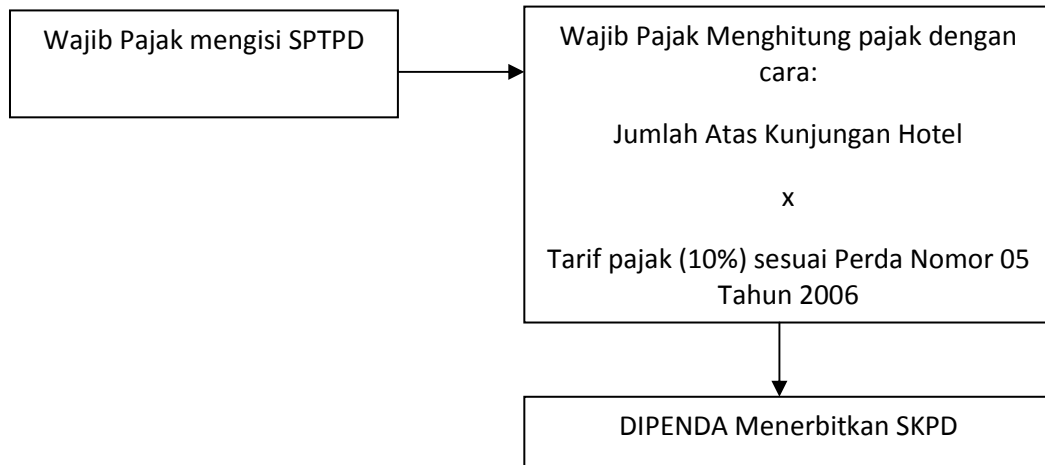
No	Jenis Permasalahan	Tindakan
1.	Kesalahan wajib pajak hotel dalam mengisi blanko isian pendaftaran wajib pajak daerah/retribusi daerah.	Petugas bidang pendaftaran dan pendataan mengembalikan blanko tersebut dan memberikan arahan kepada wajib pajak.
2.	Kesalahan pihak Petugas pendaftaran dan pendataan Dipenda dalam pengentrian data.	Petugas tersebut mengkoreksi kembali data.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010)

Dari tabel 5.1.1.2 di atas dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan di lapangan yaitu kesalahan wajib pajak hotel dalam mengisi blanko isian pendaftaran dan belum melengkapi persyaratan dalam melengkapi persyaratan, sedangkan yang dilakukan oleh petugas pendaftaran dan pendataan yaitu mengembalikan kepada wajib pajak dan memberikan arahan kepada wajib pajak tentang tata cara pengisian blanko pendaftaran. Permasalahan yang lain yaitu kesalahan pihak petugas pendaftaran dan pendataan Dipenda dalam pengentrian atau memasukan data-data wajib pajak, tindakan yang dilakukan adalah petugas mengkoreksi kembali data-data tersebut.

5.1.2 Penetapan pajak

Gambar 5.1.2. Rangkaian Proses Penetapan Pajak Hotel Kota Pekanbaru.



(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010)

Dalam Perda Nomor 05 Tahun 2006 wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada Walikota Pekanbaru dalam hal ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang perhitungan dan pembayaran serta melaporkan sendiri pajak hotelnya yang terhutang. Karena sistem berkaitan dengan sistem *self assesment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setelah itu berdasarkan gambar di atas proses dari sistem penetapan pajak diawali wajib pajak hotel mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menghitung pajak dengan jalan mengalikan jumlah atas kunjungan hotel (okupansi) dengan tarif dasar pajak 10%, dan mengembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian atas dasar isian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak hotel, diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Dipenda Kota Pekanbaru setelah Dipenda Kota Pekanbaru menetapkan pajak yang harus dibayar. Setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dibebankan kepada setiap wajib pajak hotel yaitu 10% (persen) dari dasar pengenaan atau jumlah atas kunjungan tamu pembayaran yang di terima pihak hotel. Sebagai pelaksana dalam kegiatan penetapan pajak ini adalah Bidang Pendataan dan Penetapan pada seksi Penetapan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai pada bagian pendaftaran dan penetapan, mengatakan:

“Dalam proses menetapkan pajak hotel sering terkendala akibat ada sebagian wajib pajak hotel yang tidak mengisi isian SPTPD dengan benar seperti tidak mengklarifikasi kepada Dipenda kota Pekanbaru tentang perubahan tarif kamar hotel yang bersangkutan, serta tidak melaporkan ada renovasi di hotelnya atau penambahan jumlah kamar hotel, sehingga memperlambat dari proses pembayaran pajak hotel itu sendiri dan berpengaruh pada besaran pembayaran kewajibannya.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proses penetapan pajak oleh Dipenda Kota Pekanbaru masih mengalami kesalahan dalam mengisi formulir SPTPD. Di dalam pengisian SPTPD yang dilakukan oleh wajib pajak hotel kerap terjadi kekeliruan seperti tidak mengklarifikasi kepada pihak Dipenda tentang menaikkan harga tarif kamar ataupun menambah jumlah kamar hotel yang di milikinya. Karena kenaikan tarif kamar akan mempengaruhi besaran pokok pajak yang akan di bayar wajib pajak hotel. Apabila itu sering terjadi pada proses penetapan dan penghitungan besaran pajak maka kota Pekanbaru akan mengalami kerugian karena potensi yang di miliki hotel tidak dapat ditetapkan seluruhnya menjadi pajak yang harus di bayar wajib pajak

sebagai kewajibannya membayar pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa pada proses penetapan pajak ini belum berjalan dengan optimal dan sesuai dengan prosedur yang ada seperti di bawah ini :

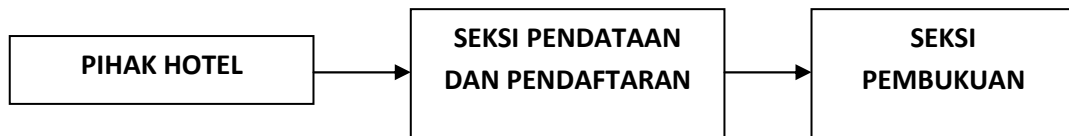
Dalam peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 pasal 3 disebutkan:

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah seluruh jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

Dari perhitungan penetapan pajak yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan yang ada bahwa tarif yang dikenakan pada setiap hotel adalah sebesar 10 % (persen) kemudian besaran pokok pajak hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan 10 % dengan jumlah atas kunjungan hotel. Untuk mengetahui jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing hotel pihak Dipenda Kota Pekanbaru khususnya seksi penetapan pajak menetapkan berdasarkan isian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi oleh pihak wajib pajak hotel itu sendiri. Didalam isian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut potensi jumlah kamar yang dimiliki hotel lalu tarif yang dikenakan pada setiap kamar yang terjual. Maka kesimpulannya bahwa kenaikan tarif pada kamar yang terjual akan mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Oleh sebab itu apabila terjadi kenaikan tarif harus dilaporkan kepada Dispenda Kota Pekanbaru, dalam hal ini adalah pada sub bidang Pendaftaran dan Penetapan.

5.1.3 Pembukuan dan Pelaporan

Gambar 5.1.3. Rangkaian Proses Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.



(Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010)

Berdasarkan gambar di atas kegiatan pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data mengenai penerimaan pajak hotel dan pajak lainnya berdasarkan objek data yang sudah terdata kemudian ditetapkan sebagai wajib pajak. Proses pembukuan diperoleh dari pihak hotel sebagai wajib pajak lalu di data oleh seksi pendataan dan pendaftaran melalui isian dari SPTPD lalu kemudian di catat kedalam buku jenis pajak hotel, sehingga seksi pembukuan dengan data tersebut dapat melakukan perhitungan tentang target yang akan dicapai dalam penerimaan pajak hotel secara keseluruhan di kota Pekanbaru.

Wajib pajak hotel yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,00 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan dan harga jual. Pembukuan berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2006 adalah suatu proses penetapan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban modal, penghasilan, biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup

dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. Kegiatan ini dikoordinir oleh bidang Penagihan pada seksi Pembukuan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pada bidang penagihan pada seksi pembukuan verifikasi evaluasi dan pelaporan mengatakan bahwa :

“ Rata-rata setiap hotel sudah memiliki pembukuan hotelnya tersendiri ,hal tersebut berguna bagi hotel mereka dalam menentukan omset dan bermanfaat dalam menentukan pajak yang akan mereka bayar. Mengenai besaran biaya yang dibayar oleh wajib pajak hotel tidak boleh dipublikasikan dan bersifat rahasia dan privasi yang wajib Dipenda Kota Pekanbaru lindungi kerahasiannya karena sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap hotel telah memiliki pembukuan mereka sendiri karena berguna bagi mereka untuk mengetahui omset dan berguna juga untuk menghitung besaran pajak yang akan dibayar. Sedangkan data pembukuan yang dimiliki Dipenda Kota Pekanbaru tentang besaran pajak hotel yang dibayar oleh masing-masing wajib pajak hotel tidak boleh dipublikasikan dan bersifat rahasia dan privasi bagi pihak hotel dan Dipenda Kota Pekanbaru yang harus dijaga kerahasiannya. Hal tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau di beritahuakan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dari penjelasan di atas adalah bahwa setiap petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- b. Data yang diperoleh dalam rangka pemeriksaan
- c. Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
- d. Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Pihak Dipenda Kota Pekanbaru membukukan semua surat ketetapan pajak daerah (SKPD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pajak daerah khususnya pajak hotel. Sedangkan pembukuan yang dilakukan oleh pihak hotel yaitu untuk kepentingan hotel mereka sendiri selain itu juga sebagai antisipasi mereka apabila sewaktu-waktu pihak Dipenda memerlukan catatan ataupun dokumen pembukuan mereka yang berkaitan dengan objek pajak terhutang, mereka wajib menyediakan. Dalam pelaksanaan proses pembukuan dan pelaporan oleh Dipenda Kota Pekanbaru juga masih mengalami permasalahan yang terjadi

yang didapatkan dari hasil wawancara pada responden atau narasumber pegawai pembukuan dan Pelaporan yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1.3. Permasalahan dan Tindakan Dalam Proses Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

No.	Jenis Permasalahan	Tindakan
1.	Wajib pajak yang sudah membayar tidak terdata atau petugas terlambat mencatat pembayaran yang dilakukan wajib pajak.	Mengkoreksi kembali dan kemudian mendata ulang (memperbaiki sistem).

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proses pembukuan dan pelaporan oleh Dipenda Kota Pekanbaru mengalami permasalahan yaitu wajib pajak yang sudah membayar tidak terdata dalam buku penerimaan hal tersebut karena keterlambatan pihak petugas bidang pembukuan dalam mencatat pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, tindakan yang dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem yaitu mengkoreksi kembali data pembayaran serta bukti pembayaran yang ada. Hal tersebut disebabkan sistem pembukuan pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru masih bersifat manual.

5.1.4 Pemungutan dan penagihan

Kegiatan pemungutan dan penagihan merupakan proses akhir dari tahapan-tahapan dalam sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru.

Pembayaran yang dilakukan atas pajak terhutang yang dilakukan oleh wajib pajak hotel adalah penyetoran. Sistem pemungutan pajak hotel di kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menggunakan sistem *self assesment*, yaitu pembayaran dilakukan sendiri secara langsung oleh wajib pajak.

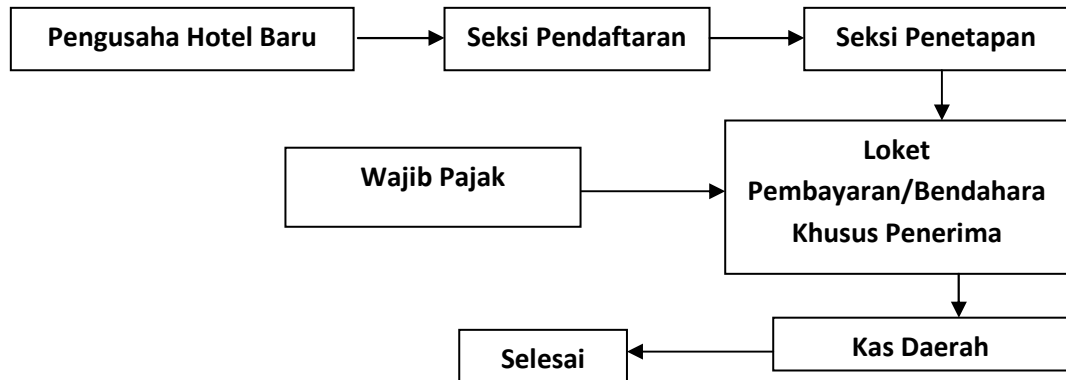
Dalam Perda Nomor 05 Tahun 2006 Pasal 6 poin 1 dijelaskan bahwa pemungutan pajak tidak dapat diborongkan atau tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Sedangkan yang dibolehkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga yaitu mencetak formulir-formulir perpajakan dan pengiriman surat-surat kepada wajib.

Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak hotel diberikan biaya pemungutan diatur berdasarkan Peraturan Walikota yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Kota Pekanbaru. Biaya ini di peruntukkan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan seta pembayaran upah gaji terhadap pegawai kontrak yang ada pada Dipenda Kota Pekanbaru. Biayanya adalah sebesar 5 % (persen) dari realisasi penerimaan pajak.

Dalam pelaksanaan di lapangan biaya pemungutan itu disetorkan bersamaan dengan pembayaran pajak terhutang yang di bayar tiap bulannya yaitu sebesar 5% (persen) dari realisasi penerimaan pajak. Biaya pungutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan perda yang berlaku. Sedangkan proses penyetoran juga memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan Perda Nomor 05 Tahun 2006.

Untuk mengetahui secara jelas tentang sistem penyetoran atau pembayaran pajak hotel dapat di lihat gambar dibawah sebagai berikut :

Gambar 5.1.4 Rangkaian Proses Penyetoran Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.



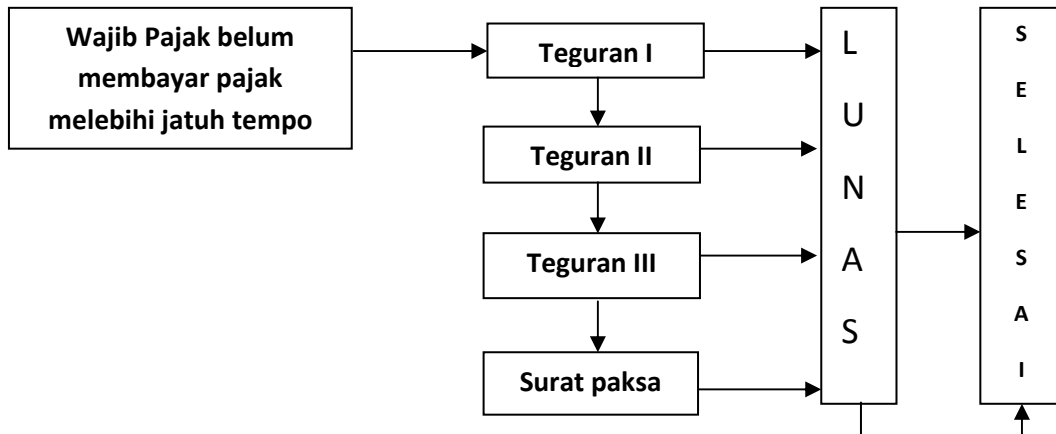
(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010)

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua penyetoran pajak hotel. Cara yang pertama adalah Pengusaha Hotel Baru atau wajib pajak hotel yang baru harus melalui seksi pendaftaran dan pendataan untuk melaporkan dan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan pada seksi penetapan baru kemudian wajib pajak hotel yang baru dapat membayar pajak hotelnya ke loket pembayaran atau Bendahara Khusus Penerima. Sedangkan cara kedua yaitu wajib pajak yang hotel yang lama dapat secara langsung membayar pajak terutangnya kepada loket pembayaran atau Bendahara Khusus Penerimaan. Pajak hotel dibayarkan langsung ke kantor Dipenda Kota Pekanbaru melalui Bendahara Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru. Kemudian Pajak Hotel tersebut langsung di setorkan oleh bendahara khusus penerima ke kas daerah kota Pekanbaru. Kegiatan pemungutan dan penyetoran pajak hotel menggunakan sistem *self assesment*.

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran yaitu setiap tanggal 20 (dua puluh) tiap bulannya, maka petugas yang

ditunjuk akan melakukan penagihan pajak. Proses penagihan tersebut sudah di atur dalam Perda Nomor 05 Tahun 2006 Pasal 12.

Gambar 5.1.4.1. Rangkaian Proses Penagihan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.



(Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,2010)

Tujuan dari pelaksanaan penagihan adalah sebagai usaha penegakan hukum agar wajib pajak hotel memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Pasal 7, wajib pajak dikenakan denda sebesar 2% (persen) perbulannya. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa proses sistem penagihan yaitu dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pihak Dipenda Kota Pekanbaru memeberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran tanggal 20.
2. Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

3. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
4. Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
5. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pembayaran yang benar adalah pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran. Tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah sebelum tanggal 20 pada bulan depan, apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda Nomor 05 Tahun 2006 seperti yang telah dijelaskan diatas. Rangkaian kegiatan ini dikoordinir oleh unit Bidang Penagihan yaitu seksi Penagihan.

Pada tahap pemungutan dan penagihan di kota Pekanbaru dalam sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dipenda Kota Pekanbaru masih belum berjalan optimal berdasarkan data sekunder yang peneliti temukan serta berdasarkan hasil wawancara pengakuan dari narasumber atau responden yang terkait dalam kegiatan penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru yaitu dapat di rinci sebagai berikut :

1. Berdasarkan data sekunder yang bersumber dari bahan bacaan media

cetak yaitu harian Riau Pos 12 Februari 2010 :

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru terdapat sekitar 58 hotel di Kota Pekanbaru belum melunasi pajak daerah. Durasi tunggakan pembayaran pajak tersebut bervariasi. Baik dari tahun 2007, 2008 dan 2009. Dampak dari hal tersebut, Pemkot mengalami kerugian sekitar Rp2 miliar. Untuk itu, Dispenda mengambil langkah tegas dengan memberikan deadline kepada para pelaku usaha hingga 19 Februari. Kepala Dispenda Pekanbaru Syofian melalui Kabid Penagihan Suprapti mengatakan dari target pajak Rp3 miliar, baru sekitar Rp1 miliar yang telah dilunaskan. Disebutkannya, jika deadline yang diberikan Dispenda tidak ditanggapi, maka pihaknya akan melakukan teguran keras dengan memberikan surat peringatan. "Kita memberikan deadline sampai 19 Februari untuk melunasi tunggakan tersebut. Jika tidak, kita akan mengambil langkah tegas,"

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 58 hotel di Kota Pekanbaru yang belum melunasi pajak hotelnya dengan durasi yang bervariasi. Batas yang diberikan pihak Dispenda kepada pihak hotel untuk melunasi segala penunggakannya yaitu tanggal 19 Februari 2010, akan diberi sanksi tegas bagi yang tidak menepatinya. Dalam pelaksanaannya sanksi tegas yang dimaksud yaitu tindakan yang dilakukan oleh Dispenda setiap bulannya mengirimkan surat teguran kepada pihak hotel. Dapat disimpulkan juga bahwa begitu banyaknya jumlah tunggakan menggambarkan bahwa pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel yang dikelola oleh Dispenda Kota Pekanbaru belum berjalan optimal.

2. Peneliti kemudian melakukan wawancara kembali kepada kepala bidang penagihan ibu Suprapti, untuk mengetahui tindakan yang

dilakukan dipenda kota pekanbaru atas pernyataan di Riau Pos sebelumnya:

”Setelah tanggal 19 Februari 2010 ada pihak hotel yang melunasi tunggakannya ada yang tidak membayar, seperti yang terjadi pada Hotel Indrapura, mereka belum memberikan respon positif yaitu dengan membayar atas tunggakan hotelnya, hal tersebut karena memang tidak ada kunjungan di hotel mereka, namun mereka masih mnyetorkan pajak restoran mereka, pihak dipenda pekanbaru masih memberikan kesempatan dan tenggang waktu kepada mereka untuk melunasinya.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak hotel yang belum membayar tunggakan pajak hotel mereka karena memang tidak ada kunjungan tamu di hotel Indrapura tersebut. Sehingga pihak dipenda masih memberikan waktu tenggang mereka untuk melunasi tunggakan. Padahal sistem penetapan pajak perhitungan dan pelaporan pajak hotel di kota Pekanbaru sudah menggunakan sistem *self assesment*, dimana potensi yang dilaporkan adalah atas dasar perhitungan hotel tersebut, sebenarnya tidak alasan untuk membayar dan menunggak. Seharusnya pihak Dipenda Kota Pekanbaru diberikan sanksi keras pada hotel tersebut. Sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan pada harian Riau Pos tanggal 12 Februari 2010 tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi yang diberikan kepada Dipenda Kota Pekanbaru masih kurang tegas, hanya bersifat memberikan sanksi 2% (persen) dari keterlambatan membayar pajak yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo. Sehingga banyak jumlah tunggakan yang terjadi pada pajak hotel di kota Pekanbaru ini.

3. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang di dapatkan dari narasumber bagian penagihan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.4.1 Permasalahan dan Tindakan Dalam Proses Kegiatan Pemungutan dan Penagihan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

No	Jenis Masalah	Tindakan
1.	Keterlambatan wajib pajak hotel membayar pajak (melewati batas tanggal pembayaran.	Langsung dikenakan sanksi sebesar 2% secara langsung ketika membayar pajak bulan berikutnya.
2.	Pihak wajib pajak hotel tidak membawa SPTPD serta bukti pembayaran yang lainnya saat menyetorkan pajak hotel.	Meminta kepada pihak hotel untuk membawa SPTPD serta bukti pembayaran lainnya baru kemudian bisa memnyetor pajaknya.

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,2010)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam kegiatan penagihan terjadi yaitu keterlambatan wajib pajak hotel dalam membayar pajak melewati batas tanggal pembayaran tindakan yang dilakukan oleh pihak dipenda kota pekanbaru yaitu memberi sanksi sebesar 2% dari realisasi penerimaan pajak yang di bayarkan pada bulan berikutnya. Pembayaran pajak hotel idealnya adalah setiap tanggal 20 (dua puluh) tiap bulannya sesuai dengan peraturan yang ada, keterlambatan ini menunjukan bahwa sistem pembayaran pajak hotel yang dilaksanakan masih belum berjalan optimal dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kendala yang lain yaitu pihak wajib pajak hotel tidak membawa SPTPD serta bukti pembayaran yang lainnya saat menyetorkan pajak terhutangnya, tindakan yang diberikan adalah meminta kepada pihak wajib pajak untuk membawa

terlebihi dahulu SPTPD serta bukti pembayaran lainnya untuk kemudian membayar pajak hotel mereka kembali.

4. Berdasarkan pernyataan berdasarkan data pada bidang seksi penagihan bahwa untuk hotel sendiri belum ada penyitaan yang dilakukan oleh Dipenda kota Pekanbaru sendiri terhadap hotel di kota Pekanbaru. Data surat teguran yang di layangkan tiap bulannya adalah rata-rata berkisar 10%-20% per bulan dari jumlah hotel yang ada di kota Pekanbaru. Hal tersebut menandakan bahwa tiap bulannya ada sekitar 10-20 hotel di kota Pekanbaru yang terlambat melakukan pembayaran pajak hotel yang idealnya adalah tanggal 20 (dua puluh) tiap bulannya. Sebagaimana di jelaskan sebelumnya surat teguran dikeluarkan kepada wajib pajak yang belum melaukan penyetoran pajak hotelnya kepada kas daerah kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan di atas satu persatu bahwa pada sistem pemungutan dan penagihan pajak hotel di kota Pekanbaru belum berjalan optimal seperti dikemukakan di atas. Kesemua hal itu dapat di lihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru tidak dapat mencapai target yang telah di tetapkan tiap tahunnya. Padahal penerimaan pajak hotel yang ideal atau yang optimalnya adalah penerimaan pajak yang dihasilkan harus mampu mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidak tegasan pihak Dipenda Kota Pekanbaru dalam menindak wajib pajak yang menunggak pajak sangat mempengaruhi dalam pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Serta kejujuran serta kesadaran wajib pajak hotel atau pengusaha hotel

di kota Pekanbaru dalam membayar pajak, padahal pajak tersebut berfungsi sebagai pendanaan bagi pembangunan kota Pekanbaru serta memenuhi kebutuhan masyarakat kota Pekanbaru yang memiliki tujuan untuk kemajuan Kota Pekanbaru ini.

Target yang harus di capai biasanya target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan walaupun terkadang target tidak dapat terealisasi dengan baik, hal tersebut seiring dengan kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang naik tiap tahunnya dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru walaupun realisasi dari target tersebut tidak selalu tercapai tiap tahunnya. Berikut target dan realisasi pajak hotel:

Tabel 5.1.4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2006 Sampai Tahun 2009 Di Kota Pekanbaru.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2006	7.382.404.864,00	7.399.752.966,00	100,23
2007	10.654.867.700,00	8.325.740.668,00	78,14
2008	10.921.239.000,00	8.028.164.539,00	73,51
2009	13.220.955.080,00	9.020.174.352,00	68,23

(Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tahun 2010)

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 terealisasi sebanyak 100,23%, tahun 2007 sebanyak 78,14%, kemudian pada tahun 2008 sebanyak 73,51% serta tahun 2009 sebesar 68,23%.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru bahwa, dapat dikatakan sumber dari pendapatan ini cukup besar. Namun jika dilihat dari sudut pandang target terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota

Pekanbaru mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal tersebut akibat dari proses pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang belum berjalan dengan optimal, seperti yang dikemukakan seperti pada tahap-tahapan yang sudah dijelaskan di atas.

5. 2. Hambatan-Hambatan Dalam Sistem Penerimaan Pajak Hotel

Keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak hotel serta pajak daerah umumnya adalah dimaksud untuk menggalang sumber pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Maka berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel, melalui sistem kerja yang baik, teratur dan juga strategik.

Sistem tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan atau optimal karna terdapat berbagai macam hambatan yang ada sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru. Hambatan baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru yaitu:

- 1. Faktor Internal** yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :

- a. Kurangnya sosialisasi dan arahan Pemerintah Kota terhadap Wajib Pajak hotel tentang Perda Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel secara resmi.
- b. Kurangnya personil pada unit terkait dengan sistem penerimaan pajak hotel ini menyebabkan tidak terpantau secara teliti dan betul-betul sedangkan yang diurus atau dikelola adalah semua jenis pajak daerah kota Pekanbaru yang cukup banyak memiliki potensi.
- c. Kurangnya pemantauan atau pemeriksaan secara langsung kelapangan tentang objek pajak hotel yang ada di seluruh kota Pekanbaru, sehingga masih terdapat permasalahan yang terjadi pada setiap proses penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru.
- d. Kurangnya intensitas pendataan dan pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Dipenda Kota Pekanbaru yang hanya dilakukan dua kali saja awal tahun dan akhir tahun.
- e. Tempat pembayaran atau loket tempat pembayaran pajak yang menumpuk pada satu tempat dan sempit sehingga mengalami antrian yang dapat mengganggu kenyamanan penyetor pajak sehingga enggan untuk membayar pajak.
- f. Didalam pemberian sanksi sebagaimana yang diatur dalam perda No. 05 Tahun. 2006 belum terimplementasi seutuhnya. Artinya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum diterapkan belum optimal sehingga wajib pajak terus menunggak pajaknya.

2. Faktor eksternal yang berasal dari wajib pajak hotel, yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai hotel di bagian keuangan salah satu hotel berbintang yang tidak mau nama hotelnya disebutkan ini, mengatakan bahwa :

“Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang pajak hotel agak kurang, perwakilan dari Dipenda Pekanbaru tidak ada yang berkunjung menjelaskan secara langsung kepada pihak hotel, hanya mendapatkan brosur tata cara penetapan pajak yang di ambil pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada saat pembayaran pajak sebelum ditetapkannya perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak bukan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berikut wawancara dengan manajer salah satu wisma/melati yang tidak mau disebutkan nama hotelnya, mengatakan bahwa:

“Penetapan tarif pajak sebesar 10% dinilai sangat berat, karna 10% langsung di potong dari pembayaran tamu hotel perharinya yang merupakan laba kotor dari pendapatan hotel mereka sehingga keuntungan yang didapatkan juga sedikit, sehingga pada wisma kami selalu menunggak pajak hotel ini, karena kebutuhan untuk gaji karyawan dan lain-lain untuk hotel dulu yang kami utamakan.”

Sehingga peneliti mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut:

- a. Tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih kurang sehingga sebagian besar wajib pajak hotel masih banyak yang menunggak atau tidak membayar pajak padahal sudah menggunakan sistem *self assesment* dimana semua perhitungan pajak yang harus dibayar dilakukan oleh wajib pajak hotel itu sendiri.
- b. Masih ditemui adanya wajib pajak hotel yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak baik dari segi jumlah maupun batas waktu yang telah ditetapkan dengan baik sehingga mempengaruhi kurang lancarnya proses administrasi perpajakan.

- c. Keterbatasan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak Hotel tentang Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pajak hotel sehingga tidak tahu bahwa ada sanksi-sanksi yang ada di dalam perda tersebut.
- d. Wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak hotelnya leboh mengutamakan masalah keuangan intern hotelnya dahulu ketimbang membayar pajak hotelnya.
- e. Masih banyak ditemui beberapa wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan potensi kamar hotelnya serta besran tarif hotel mereka apabila menaikan tarif kamar.

5. 3. Upaya – Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Untuk Meningkatkan Penerimaan dari Sektor Pajak Hotel.

Upaya-upaya yang dilakukan dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel meliputi :

1. Terus melakukan penagihan atas tunggakan wajib pajak hotel di kota Pekanbaru.
2. Memberikan tenggang waktu dan membuat perjanjian dengan wajib pajak hotel untuk melunasi tunggakan pajaknya untuk di lunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Memberikan denda kepada wajib pajak hotel 2% bagi wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak perbulannya. Sehingga wajib pajak meras enggan untuk melakukan penunggakan dimasa yang akan datang

4. Kegiatan Belanja Modal Jaringan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah sekaligus sebagai media untuk penyuluhan atau himbauan untuk membayar pajak atau melunasi pajak melalui poster dan reklame di jalan-jalan protokol kota Pekanbaru.
5. Peningkatan profesionalisme SDM pada Dinas Pendapatan Daerah, melalui peningkatan kualitas pendidikan, diklat struktural dan pelatihan teknis fungsional, serta penataan sistem penerimaan pajak hotel.
6. Membuat formulir rekapitulasi penjualan atas objek yang diberikan pada tiap hotel untuk di isi tiap bulannya, untuk mengetahui jumlah omset tiap harinya dalam satu bulan, ini baru berjalan 2 (dua) bulan terakhir.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai analisis penerimaan pajak hotel pada kota Pekanbaru, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai akhir dari penulisan dan juga menjawab permasalahan ini yaitu sebagai berikut :

Sistem Penerimaan Pajak Hotel Pada Kota Pekanbaru.

1. Pendaftaran dan Pendataan

Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dimulai dari proses pengisian formulir pendaftaran wajib pajak, dikeluarkannya NPWPD dan sampai dengan keluarnya surat pengukuhan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006. Berdasarkan data diperoleh hotel yang sudah terdaftar pada Dipenda Kota Pekanbaru sudah terjaring semuanya, ini membuktikan pengusaha hotel sudah sadar akan kewajibannya untuk mendaftarkan usahanya.

2. Penetapan

Dalam pelaksanaan penetapan pajak hotel sudah sesuai dengan Perda Nomor 05 Tahun 2006, karena telah menggunakan sistem *self assesment*. Wajib pajak sendiri yang memperhitungkan dan pembayaran serta melaporkan sendiri pajak hotel terhutangnyanya dalam isian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dasar pengenaan pajak hotel

adalah 10% (persen) dikali dengan jumlah atas kunjungan hotel yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006. Namun setelah penulis mengadakan penelitian sistem *self assesment* ini rentan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel.

3. Pembukuan dan Pelaporan

Dalam pelaksanaan pembukuan dan pelaporan setiap kegiatan yaitu mulai dari sistem dan prosedur pendaftaran sampai dengan penyetoran dalam hal pemungutan pajak daerah sudah cukup optimal. Keterangan dari pihak Dipenda Kota Pekanbaru wajib pajak hotel rata-rata hampir keseluruhan pihak wajib pajak hotel telah menyelenggarakan pembukuannya serta melaporkan kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

4. Pemungutan dan Penagihan

Dalam proses pemungutan dan penyetoran pajak hotel di Kota Pekanbaru hanya dilakukan dengan menggunakan sistem *self assesment*. Wajib pajak hotel langsung menyetor kewajibannya ke Loker Pembayaran atau Bendahara Khusus Penerima kemudian masuk ke dalam kas daerah kota Pekanbaru. Lokasi loket pembayaran ini berada dalam kantor Dipenda kota Pekanbaru. Kemudian pada pelaksanaan penagihan pihak Dipenda Kota Pekanbaru melayangkan surat teguran kepada wajib pajak hotel yang belum membayar rata-rata 10%-20% (persen) tiap bulannya dari semua jumlah hotel di kota Pekanbaru. Durasi penunggakan yang terjadi pada hotel di kota Pekanbaru yaitu terjadi pada tahun 2007, 2008, dan 2009.

Berdasarkan kenyataan di lapangan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang seharusnya diberikan kepada wajib pajak hotel yang menunggak tidak diterapkan sanksi yang seharusnya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006, masih diberikan keringanan Dipenda Kota Pekanbaru terhadap Wajib Pajak hotel.

Hambatan Dalam Sistem Penerimaan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.

Hambatan yang terjadi dalam sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terjadi baik dari hambatan yang berasal dari pihak Dispenda Kota Pekanbaru dan juga berasal dari pihak wajib pajak hotel. Hambatan ini berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru.

Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Untuk Meningkatkan Penerimaan dari Sektor Pajak Hotel

Upaya dan kebijakan yang dilakukan pihak Dipenda Kota Pekanbaru bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru. Upaya yang dilaksanakan ini dapat memperbaiki kondisi sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru ke depannya.

6.2. Saran

Dari hasil pembahasan yang sudah di bahas dalam bab sebelumnya, disini peneliti akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel agar kota Pekanbaru dapat melaksanakan pembangunan lebih baik kedepannya nanti. Adapun saran-saran dari peneliti adalah:

1. Diharapkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk lebih transparan dan terbuka dalam menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) .
2. Diharapkan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru betul-betul memeriksa isian SPTPD yang di isi oleh wajib pajak hotel agar tidak ditemukan ketimpangan antara jumlah kunjungan hotel dengan besaran pajak yang dibayarkan yang dapat merugikan kota Pekanbaru
3. Perbaiki sistem penyetoran pajak, sediakan loket pembayaran yang lebih luas, dan pemisahan loket-loket pembayaran berdasarkan klasifikasinya, sehingga tidak terjadi antrian, dan pembukuan akan lebih teratur.
4. Diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengunjungi hotel-hotel di Pekanbaru untuk menjelaskan secara langsung tentang Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 sehingga wajib pajak akan paham pentingnya pajak bagi pembangunan kota Pekanbaru.
5. Perbaiki sistem pelaporan atas penjualan kamar hotel tiap harinya dilaporkan kepada Dipenda Kota Pekanbaru menggunakan jaringan

internet, yaitu sistem online antara hotel-hotel di kota Pekanbaru dengan Dipenda Kota Pekanbaru, agar tidak ada manipulasi dalam pelaporan penjualan kamar hotel tiap harinya, dan sebagai sistem pengawasan yang efektif, dimana semua kegiatan penjualan kamar hotel dapat diawasi tiap hari dan diterima laporannya tiap hari oleh Dipenda Kota Pekanbaru.

6. Wajib pajak hotel hendaknya mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan mencari profit oriented bagi hotelnya, sehingga timbul kesadaran untuk membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.
7. Wajib pajak hotel hendaknya tepat waktu untuk membayar pajak hotelnya, sehingga supaya tidak terjadi penunggakan dan mendapatkan sanksi 2% (persen) dan merugikan hotelnya sendiri.
8. Diharapkan Wajib pajak hotel dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sama-sama menumbuhkan rasa mempunyai tanggungjawab kepada pembangunan daerah kota Pekanbaru ini, sehingga sistem penerimaan pajak hotel yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
9. Target yang ditetapkan tiap tahunnya hendaknya berdasarkan potensi yang ada dan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dimiliki oleh tiap hotel di kota Pekanbaru agar penerimaan pajak hotel dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
10. Hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak ketiga atau biro khusus yang di sewa atau dikontrak untuk mendata seluruh potensi yang ada agar tidak ada lagi kecurangan atau

manipulasi dalam pelaporan potensi yang dimiliki hotel, sehingga tidak ada potensi yang tersembunyi.

11. Perlu adanya menghitung mengenai efisiensi biaya pungut pajak hotel sebesar 5% (persen) yang dipungut pada setiap hotel di kota Pekanbaru.
12. Penegakan hukum (law inforcement) agar lebih diterapkan dan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan tentang pajak daerah yang berlaku serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Herman. 2009. *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*. Rakyat Merdeka Group; Jakarta.
- Ari Kunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi III PT. Rineka Cipta anggota IKAPI ; Jakarta.
- Akbar Nasution, Faisal. 2009. *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. PT. Sofmedia ; Jakarta.
- Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi Tahun 2008*. PT. RajaGrafindo Persada; Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 2009. *Data Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Hadi, Moeljo. 2001. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada; Jakarta.
- Ismail, Tjip. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia Edisi 2007*. Yellow Printing ; Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2006. *Kitab undang-undang otonomi daerah*. PT. Pradnya Paramita; Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Press; Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi 2008*. Andi Jogjakarta; Jogjakarta.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel.
- Setiawan, Agus. 2006. *Perpajakan Umum*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

Setia Tunggal, Hadi. 2009. *Buku Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU RI No. 28 Tahun 2009)*. Harvarindo; Jakarta.

Setia Tunggal, Hadi. 1999. *Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Harvarindo; Jakarta.

Siahaan P , Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Pratama; Jakarta.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta Anggota IKAPI; Bandung.

Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia; Jakarta.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Rajawali Press; Jakarta.

Yani , Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pmeerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi 2008*. Rajawali Pers; Jakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki pedoman dalam melakukan wawancara yang dilaksanakan kepada unit terkait dalam bidang penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat berkenaan dengan sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru. Adapun pedoman wawancara yang dilakukan peneliti berupa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak hotel yang dikelola oleh Dipenda Kota Pekanbaru mengalami permasalahan?
2. Apa saja jenis permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak hotel pada Dipenda Kota Pekanbaru? Dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Dipenda Kota Pekanbaru?
3. Apakah dalam pelaksanaan penetapan pajak hotel mengalami kendala atau menghadapi permasalahan?
4. Apa saja jenis permasalahan yang kerap terjadi pada proses kegiatan penetapan pajak hotel?
5. Apakah setiap wajib pajak hotel di kota Pekanbaru telah memiliki pembukuan sendiri?
6. Apakah dalam pelaksanaan pembukuan dan pelaporan ditemukan kendala atau permasalahan?

7. Permasalahan apa yang terjadi dan bagaimana tindakan yang dilakukan?
8. Pernyataan dalam media massa oleh pihak Dipenda Kota Pekanbaru mengenai penunggakan pajak hotel yang dilakukan 58 hotel dengan durasi tunggakan tahun 2007, 2008, dan 2009. Deadline sampai tanggal 19 Februari 2010 yang diberikan oleh pihak Dipenda Pekanbaru untuk melunasi tunggakan, jika tidak dilunasi akan diberikan sanksi yang tegas. Apakah sudah memenuhi target yang diberikan? Apakah wajib pajak hotel sudah melunasi semua tunggakan?
9. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Dipenda kota Pekanbaru dalam menindak wajib pajak hotel yang belum bisa melunasi tunggakannya?
10. Berapa persenkah tiap bulannya dilayangkan surat teguran oleh sub bidang penagihan atas keterlambatan pembayaran pajak hotel di kota Pekanbaru?
11. Permasalahan dan tindakan apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penagihan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
12. Bagaimanakah proses sosialisasi pajak hotel di kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menurut wajib pajak hotel sendiri?
13. Penyebab sering terjadinya tunggakan pada wajib pajak hotel?
14. Bagaimanakah cara perhitungan potensi pajak hotel?

15. Kendala yang dirasakan oleh wajib pajak hotel dalam pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru?
16. Apakah penerapan tarif pajak hotel yang telah ditetapkan 10% apakah dirasakan berat oleh wajib pajak hotel?
17. Bagaimanakah proses penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak hotel?
18. Masalah pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel sudah sesuai dan sama dengan potensi yang ada serta pelaporan kepada Dipenda Kota Pekanbaru apakah sama?
19. Bagaimana cara menentukan target penerimaan pajak hotel di kota pekanbaru tiap tahunnya?
20. Mengapa target yang ditetapkan untuk pajak hotel naik tiap tahunnya?
21. Apakah sudah ada hotel yang di sita oleh Pemda Kota Pekanbaru?

DAFTAR NAMA HOTEL YANG TERDATA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NO.	N A M A	ALAMAT	NPWPD	KLASIFIKASI
1	HOTEL TASIA RATU	JL. HASYIM ASHARI NO. 10	3.0001896.01.01	BINTANG 1
2	HOTEL RAUDAH	JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 4	3.0001900.01.04	BINTANG 1
3	HOTEL ASEAN BARU	JL. TUANKU TAMBUSAI	3.0002583.07.05	BINTANG 1
4	HOTEL RESTY MENARA	JL. SISINGAMANGARAJA	3.0004826.04.03	BINTANG 1
5	HOTEL NUANSA/PERMAI	JL. TANJUNG DATUK NO. 87	3.0012208.04.02	BINTANG 1
6	HOTEL INDRAPURA	JL. DR. SUTOMO NO. 86	3.0000200.04.03	BINTANG 2
7	MONA PLAZA HOTEL	JL. HR. SUBRANTAS PANAM	3.0034802.08.01	BINTANG 2
8	HOTEL SRI INDRAYANI	JL. KARET	3.0000170.03.03	BINTANG 3
9	HOTEL FURAYA	JL. JEND. SUDIRMAN	3.0013260.03.03	BINTANG 3
10	HOTEL DYAN GRAHA	JL. GATOT SUBROTO NO. 9	3.0013264.01.04	BINTANG 3
11	HOTEL RATU MAYANG	JL. JEND. SUDIRMAN	3.0020367.07.04	BINTANG 3
12	HOTEL IBIS	JL. SOEKARNO HATTA	3.0031727.09.04	BINTANG 3

13	HOTEL GRAND ZURI	JL. TEUKU UMAR	3.0033937.04.03	BINTANG 3
14	HOTEL GRAND ELITE	JL. RIAU KOMPLEK RBC	3.0041167.09.03	BINTANG 3
15	HOTEL ASTON PEKANBARU CITY	JL. JEND. SUDIRMAN	3.0046826.01.01	BINTANG 3
16	HOTEL MUTIARA MERDEKA	JL. D. I. PANJAITAN	3.0003940.03.01	BINTANG 4
17	HOTEL PANGERAN	JL. JEND. SUDIRMAN	3.0030294.05.03	BINTANG 4
18	HOTEL GRAND JATRA	JL. T. ZAINAL ABIDIN	3.0038347.01.04	BINTANG 5
19	HOTEL ARYADUTA	JL. DIPONEGORO NO. 34	3.0020835.01.05	BINTANG 5
20	HOTEL BUNDA	JL. PROF. M. YAMIN	3.0000009.03.03	MELATI/WISMA
21	WISMA MUARA TAKUS	JL. CEMPEDAK	3.0000050.02.08	MELATI/WISMA
22	HOTEL DHARMA UTAMA	JL. SISINGAMANGARAJA NO. 10	3.0000056.01.03	MELATI/WISMA
23	HOTEL WIDYA	JL. M. ALI	3.0000058.03.06	MELATI/WISMA
24	HOTEL MEGARA	JL. JEND. AHMAD YANI	3.0000095.01.06	MELATI/WISMA
25	LOSMEN PEKANBARU	JL. IR. H. JUANDA	3.0000103.03.03	MELATI/WISMA
26	HOTEL LINDA I	JL. TUANKU TAMBUSAI	3.0000127.02.08	MELATI/WISMA
27	WISMA UNEDO	JL. CEMPEDAK	3.0000160.02.08	MELATI/WISMA
28	WISMA YANI	JL. PEPAYA NO. 7	3.0000162.02.05	MELATI/WISMA
29	HOTEL AFRI	JL. DR. SETIA BUDHI	3.0000203.04.02	MELATI/WISMA

30	HOTEL SINDA	JL. PEPAYA NO. 73	3.0000211.02.05	MELATI/WISMA
31	HOTEL TAMPAN	JL. RIAU	3.0001538.03.01	MELATI/WISMA
32	HOTEL ASEAN	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 722	3.0001567.07.05	MELATI/WISMA
33	HOTEL ANGKASA	JL. DR. SETIA BUDHI NO. 89	3.0001669.04.02	MELATI/WISMA
34	HOTEL ANOM	JL. GATOT SUBROTO	3.0001557.01.04	MELATI/WISMA
35	WISMA TUN TEJA I	JL. KAMPAR NO. 34	3.0001689.03.06	MELATI/WISMA
36	WISMA TUN TEJA II	JL. SISINGAMANGARAJA NO. 4	3.0001691.01.03	MELATI/WISMA
37	HOTEL BADARUSSAMSI	JL. SISINGAMANGARAJA NO. 71	3.0001691.01.03	MELATI/WISMA
38	HOTEL BADAR LUGINA	JL. SISINGAMANGARAJA	3.0001904.01.04	MELATI/WISMA
39	WISMA BINTAN	JL. TANGKUBAN PERAHU	3.0001906.01.04	MELATI/WISMA
40	WISMA HANG TUAH	JL. HANG TUAH	3.0001916.05.01	MELATI/WISMA
41	WISMA HANG JEBAT	JL. HANG JEBAT NO. 18 A	3.0001918.05.01	MELATI/WISMA
42	HOTEL SATRIA	JL. CIK DI TIRO NO. 99	3.0001927.01.06	MELATI/WISMA
43	HOTEL NANKING	JL. RAYA KULIM	3.0002527.07.02	MELATI/WISMA
44	PENGINAPAN RINA	JL. M. YATIM	3.0003189.03.04	MELATI/WISMA
45	HOTEL RIKI INDAH	JL. SOEKARNO HATTA NO. 206	3.0005169.08.04	MELATI/WISMA
46	WISMA CEMPAKA	JL. CEMPAKA NO. 98	3.0005399.03.05	MELATI/WISMA

47	HOTEL GEMINI	JL. TASKURUN NO. 44	3.0005600.02.08	MELATI/WISMA
48	HOTEL PEKANBARU CITY	JL. SAM RATULANGI NO. 28	3.0009835.03.03	MELATI/WISMA
49	HOTEL LINDA II	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 145	3.0010209.02.08	MELATI/WISMA
50	PENGINAPAN HOLLY	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 116 B	3.0010275.02.06	MELATI/WISMA
51	WISMA INDAH	JL. DR. SAMANHUDI NO. 901	3.0011886.03.03	MELATI/WISMA
52	HOTEL BUMI ASIH	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 51	3.0011946.07.05	MELATI/WISMA
53	WISMA FLORA HOME STAY	JL. KAPLING I / JL. SAMARINDA NO. 7	3.0012155.07.05	MELATI/WISMA
54	WISMA TASKURUN	JL. TASKURUN	3.0012157.02.08	MELATI/WISMA
55	WISMA BINA LESTARI	JL. PROF. M. YAMIN NO. 19	3.0013645.01.01	MELATI/WISMA
56	HOTEL SENAPELAN	JL. PROF. M. YAMIN	3.0014502.03.06	MELATI/WISMA
57	WISMA FIRMAN	JL. H. IMAM MUNANDAR	3.0015964.07.05	MELATI/WISMA
58	HOTEL MINI	JL. TEUKU UMAR NO. 21	3.0016187.04.03	MELATI/WISMA
59	HOTEL LIDO	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 124 A	3.0016240.02.06	MELATI/WISMA
60	HOTEL AFRIDA	JL. GAMBIR	3.0017678.01.01	MELATI/WISMA
61	HOTEL SHOREA	JL. TASKURUN	3.0018777.02.08	MELATI/WISMA
62	WISMA MELLA	JL. PAUS NO. 4	3.0019290.02.08	MELATI/WISMA
63	WISMA SUKAJADI	JL. MELUR	3.0021849.02.03	MELATI/WISMA

64	HOTEL MAKMUR JAYA	JL. RIAU	3.0023046.08.02	MELATI/WISMA
65	HOTEL MAHKOTA	JL. IR. H. JUANDA	3.0025373.03.04	MELATI/WISMA
66	WISMA TIRTA KENCANA	JL. KAHARUDDIN NASUTION	3.0026198.07.04	MELATI/WISMA
67	PENGINAPAN KAUTSAR	JL. DR. SETIA BUDHI	3.0026163.04.03	MELATI/WISMA
68	WISMA DWI DHARMA	JL. UTAMA/NENAS NO. 90 A	3.0026349.02.05	MELATI/WISMA
69	HOTEL DAMON	JL. HANG TUAH NO. 46 A	3.0028587.05.01	MELATI/WISMA
70	PONDOK WISATA IDAYU	JL. LILI NO. 31	3.0029291.02.02	MELATI/WISMA
71	HOTEL BIDADARI	JL. GATOT SUBROTO NO. 2	3.0030139.01.04	MELATI/WISMA
72	WISMA AROMA	JL. IR. H. JUANDA NO. 48-50	3.0031409.03.03	MELATI/WISMA
73	WISMA 45	JL. H. IMAM MUNANDAR	3.0031786.07.05	MELATI/WISMA
74	WISMA 81	JL. JEND. SUDIRMAN	3.0032008.02.08	MELATI/WISMA
75	HOTEL BINTANG MAS	JL. DR. SUTOMO NO. 90	3.0033559.04.03	MELATI/WISMA
76	HOTEL INTAN	JL. TUANKU TAMBUSAI KAV. 5-6	3.0038821.11.02	MELATI/WISMA
77	WISMA SURYA	JL. CEMPEDAK	3.0033835.00.00	MELATI/WISMA
78	WISMA PELANGI	JL. GATOT SUBROTO NO. 39 C-D	3.0033920.01.04	MELATI/WISMA
79	EMMA GRAHA HOTEL	JL. SOEKARNO HATTA	3.0033952.08.03	MELATI/WISMA
80	HOTEL ALOHA	JL. TANJUNG DATUK	3.0034800.04.01	MELATI/WISMA

81	HOTEL HOLIDAY	JL. TANJUNG DATUK	3.0034800.04.01	MELATI/WISMA
82	HOTEL JAYA MULIA	JL. RIAU NO. 168	3.0035516.08.02	MELATI/WISMA
83	WISMA 63	JL. RIAU UJUNG	3.0035849.11.01	MELATI/WISMA
84	HOTEL DELTA	JL. SISINGAMANGARAJA	3.0035845.01.04	MELATI/WISMA
85	WISMA SUMBER MAS RAYA	JL. TANJUNG DATUK NO. 241	3.0037271.04.02	MELATI/WISMA
86	HOTEL SIAK RESORT	JL. MERANTI UJUNG	3.0038320.03.01	MELATI/WISMA
87	WISMA DAHLIA	JL. DAHLIA NO. 137	3.0038989.02.01	MELATI/WISMA
88	HOTEL SOGHO	JL. SOEKARNO HATTA	3.0039082.11.02	MELATI/WISMA
89	SURYA CITRA HOTEL	JL. SIAK II	3.0043120.11.01	MELATI/WISMA
90	WISMA MELATI	JL. KOTA BARU NO. 43	3.0044216.03.02	MELATI/WISMA
91	WISMA PERMATA	JL. JEND. SUDIRMAN	3.0044363.01.01	MELATI/WISMA
92	HOTEL SEPUPU SATRIA	JL. ARIFIN ACHMAD NO. 88	3.0041167.09.03	MELATI/WISMA
93	WISMA AMANDA	JL. GULAMA NO. 9-10 C	3.0041809.09.01	MELATI/WISMA
94	WISMA SMR	JL. H. R. SUBRANTAS	3.0041931.08.07	MELATI/WISMA
95	WISMA BENNY	JL. PAUS RUMBAI	3.0042000.12.06	MELATI/WISMA
96	HOTEL OASE	JL. WAHID HASYIM NO. 255	3.0042111.01.03	MELATI/WISMA
97	HOTEL RADJA	JL. HASANUDDIN	3.0044377.04.03	MELATI/WISMA

98	SABRINA TRAVELLER BUDGET HOTEL	JL. T. TAMBUSAI	3.0046157.09.01	MELATI/WISMA
99	HOTEL AKASIA	JL. JEND. SUDIRMAN	3.0044712.07.09	MELATI/WISMA
100	SABRINA CITY HOTEL	JL. TUANKU TAMBUSAI	3.0050317.09.04	MELATI/WISMA
101	AZIZA HOTEL	Jl. NANGKA		

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010.

DOKUMENTASI OBSERVASI DAN WAWANCARA DI KANTOR DIPENDA KOTA PEKANBARU



Pegawai Bidang Penagihan Dipenda Kota Pekanbaru.



Pegawai Bidang Pembukuan dan verifikasi Dipenda Kota Pekanbaru.



Kepala Bidang Penagihan Dipenda Kota Pekanbaru. (sebeleah kiri).



Kepala Seksi Penetapan Dipenda Kota Pekanbaru.



Peneliti beserta Kepala Seksi Penetapan dan Seksi Pemeriksaan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Daftar Nama Hotel, Wisma dan Penginapan yang ada di kota Pekanbaru	4
Tabel 1.2	: Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2006 Sampai Tahun 2009 Di Kota Pekanbaru.....	7
Tabel 4.1	: Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dipenda Kota Pekanbaru.....	51
Tabel 4.2	: Keadaan Pegawai menurut Pangkat dan Golongan Pada Dipenda Kota Pekanbaru	52
Tabel 4.3	: Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin Pada Dipenda Kota Pekanbaru	53
Tabel 5.1.1	: Jumlah Objek Pajak Hotel yang Terdata Usahanya Pada Dipenda Kota Pekanbaru	58
Tabel 5.1.2	: Permasalahan dan Tindakan Dalam Proses Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Hotel Pada Dipenda Kota Pekanbaru.....	60
Tabel 5.1.3	: Permasalahan dan Tindakan Dalam Proses Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dipenda Kota Pekanbaru.....	67
Tabel 5.1.4	: Permasalahan dan Tindakan Dalam Proses Kegiatan Pemungutan dan Penagihan Hotel Pada Dipenda Kota Pekanbaru.....	74
Tabel 5.1.4.1	: Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2006 Sampai Tahun 2009 Di Kota Pekanbaru.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.4	: Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	48
Gambar 5.1	: Sistem Penerimaan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru	56
Gambar 5.1.1	: Rangkaian Proses Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru	57
Gambar 5.1.2	: Rangkaian Proses Penetapan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru	61
Gambar 5.1.3	: Rangkaian Proses Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru	64
Gambar 5.1.4	: Rangkaian Proses Penyetoran Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.....	69
Gambar 5.1.4.1	: Rangkaian Proses Penagihan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar nama hotel yang terdata di Dinas Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru.
- Lampiran 2 : Klippingan Media Cetak Riau Pos Tanggal 12 Februari 2010
- Lampiran 3 : Blanko Formulir Pendaftaran Wajib Pajak / Retribusi.
- Lampiran 3 : Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Pajak Hotel)
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Lembaran Disposisi
- Lampiran 6 : Dokumentasi Observasi dan Wawancara di Kantor
Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- Lampiran 7 : Surat Ijin Pra Riset
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol Provinsi Riau
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol Provinsi Riau kepada
Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- Lampiran 10 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Selesai Riset dari Dinas Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta 29 Agustus 1988, anak dari pasangan Raja Islizar dan Jusdinati. Dengan nama lengkap Radja Riana Agista, anak kedua dari dua bersaudara yaitu Raja Riofans Risdana.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Karya Mulya di Bandung Jawa Barat pada tahun 2000, lalu melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 23 Bandung, kemudian menamatkannya pada SLTP Negeri 13 Pekanbaru tahun 2003. Pada tahun 2006 Penulis menamatkan pendidikan di SMA Negeri 9 Pekanbaru. Pada tahun yang sama melanjutkan perkuliahan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara.

Dalam masa perkuliahan Penulis pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Gubernur Provinsi Riau pada tahun 2009. Pada tanggal 7 juni 2010 Penulis dinyatakan lulus dengan prediket sangat memuaskan dan layak menyandang gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

